

Dialog

Vol. 36, No. 2, November 2012

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

Terakreditasi C No: 362/AU1/P2MBI/07/2011
ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM:
Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
Dr. H. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bagian Umum dan Perpustakaan
Drs. H. A.M. Khaolani, M.Pd.

SEKRETARIS REDAKSI
Astuty Nilawati, S.Pd.

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)
Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. (Tafsir)
Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar (Hukum Islam)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)
Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud (Sejarah dan Kebudayaan Islam)
Prof. Dr. H. Abdul Aziz al-Bone (Pendidikan Islam)
Dr. H. Imam Tolkhah (Sosiologi Agama)
Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)
Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih al-Qur'an)
H. Chamdi Pamudji, S.H., M.M. (Pendidikan dan Pelatihan)
Drs. H. Praptono Zamzam, M.Sc. (Pendidikan dan Pelatihan)

REDAKTUR EKSEKUTIF
Dr. H. Susari, M.A.

REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)
H. Sahlani, B.A.
Reza Perwira, S.Th.I.
Sofyan Yamin, S.Si.
Rahmatillah Amin, S.Kom
Wawan Hermawan, S.Kom

ALAMAT REDAKSI
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380

WEBSITE:
www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi, untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.



PENGANTAR REDAKSI







DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol.36, No.2, November 2012

HERDI SAHRASAD

Agama dan Masalah Korupsi : Sebuah Catatan: 1-18

IYOH MASTIYAH

Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren: 19-30

NURUDIN

Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-Keagamaan di Indonesia: 31-44

SYAHRUL KIROM

Pancasila dalam Bingkai Kerukunan Beragama : 45-64

ALI USMAN

Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia : 65-80

ARIEF SUBHAN

Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal : 81-94

SYARIPULLOH

Penanggulangan Kemiskinan : 95-112

SUDIRMAN TEBBA

Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia : 113-126

SUPRAPTO

Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang : 127-148

BOOK REVIEW

AKMAL SALIM RUHANA

Terorisme [sama dengan] Jihad? : 149-166

KUMPULAN ABSTRAK 167-172

INDEKS PENULIS 173-174

AGAMA DAN MASALAH KORUPSI : SEBUAH CATATAN

OLEH: HERDI SAHRASAD*)

ABSTRAK

Salah satu masalah sosial paling gawat di negeri ini adalah korupsi. Dari era Orde Baru sampai Reformasi dewasa ini, korupsi terus menggila dan untuk sebagian, akibat lemahnya akhlak dan integritas para pejabat, politisi, dan pebisnis yang seringkali mudah tergelincir ke dalam jerat korupsi. Akibatnya, di Indonesia, ummat Islam sebagai mayoritas rakyat, masihlah menderita dan marginal akibat korupsi yang merajalela, feodalisme kekuasaan, dan struktur ekonomi-politik yang timpang. Harus diakui, di era Reformasi ini, korupsi sudah mengancam keselamatan bangsa dan negara sehingga banyak teriakan agar segera diambil tindakan tegas dan keras terhadap para koruptor. Tulisan ini ingin memberikan catatan penting mengenai agama dan masalah korupsi di Indonesia.

One of the most serious social problems in this country is corruption. From New Order to Reformation today, corruption continues craze and for the most part, due to lack of morals and integrity of officials, politicians and businessmen who are often easily slip into the trap of corruption. Consequently, in Indonesia, Muslims as a majority of the people, is still suffering and marginalized due to rampant corruption, feudalism power, and political-economic structures that lame. Admittedly, in this reform era, corruption was threatening the safety of the nation so much shouting that stern action be taken against the corrupt and violent. This paper would like to provide critical remarks about religion and the problem of corruption in Indonesia.

KEY WORDS:

Corruption, Religion, Moral and Integrity, Official, Politician, Businessmen, KPK

A. PENDAHULUAN

Dalam ceramahnya di Universitas California Berkeley, April 2012, Prof. Tariq Ramadan, cucu Hasan Al-Banna —sang pendiri sekaligus Bapak Ikhwanul Muslimin Mesir—, menegaskan

bahwa nilai-nilai Islam mengajarkan, betapa pentingnya kejujuran, keadilan sosial, kesetaraan, dan kebebasan bagi ummat manusia yang ingin terus menjaga akhlak dan keadaban mereka. Di tengah ketimpangan antara Utara

*) Herdi Sahrasad, Dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina.

dan Selatan, ketimpangan antargolongan, antarindividu, dan antarwilayah, aspirasi Islam bagi kejujuran, keadilan sosial, keseimbangan, kebebasan, dan kesetaraan itu, senantiasa mengemuka dimana-mana, termasuk di Indonesia, dalam ragam ekspresi yang berbeda-beda, baik derajat, *magnitude*, maupun intensitasnya.¹

Secara moral-etis, demikian Tariq Ramadan (Mahaguru di Oxford University, UK), kita harus mempertanyakan kekuasaan bisnis dan politik di kancah global yang hanya menguntungkan segelintir orang. Dalam pandangannya, Islam mengajarkan kita untuk mengugut: Apakah etis jika 0,1 persen elite Amerika menguasai ekonomi rakyat AS? Apakah etis jika berbagai perusahaan multinasional menguasai ekonomi dunia, dan mereka yang kaya makin kaya, sementara jutaan manusia makin miskin?

Bisakah Islam dan agama lain memberikan landasan etis bagi praktik keadilan sosial di tingkat nasional, regional dan global? Maukah kita bersama-sama menegakkan etika dalam kehidupan bisnis, politik, lingkungan, dan sosial-ekonomi yang makin timpang dan mengguncang?

Prof. Tariq Ramadan memaparkan hal itu secara menggetarkan. Suaranya mendebarkan dinding kampus UC Berkeley, Rabu (18/4/2012). Tangan Mahaguru Studi Islam di Oxford University, Inggris itu menggenggam kuat jemari kita ketika berjabat tangan. Kuatnya genggamannya itu juga tak beda dengan artikulasinya yang tajam tentang ketegangan Islam dan Barat, tentang

¹ Baca juga, Tariq Ramadan, *Radical reform: Islamic Ethics and Liberation*, Oxford University Press, 17 November 2008, 372 halaman. Tariq Ramadan, *Islam and the Arab Awakening*, Oxford University Press, 2012.

kerasnya suara Dunia Islam menuntut keadilan dan kesetaraan dalam relasi antara negara maju/Barat dan negara berkembang/Dunia Islam.

Etika Islam, ungkapnya, sangat kaya dalam pertautan dan pergulatan dengan kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan untuk masa depan umat manusia bersama, masa depan kita semua.

Tariq Ramadan mengingatkan kini dunia berubah, dimana kuasa politik dan bisnis serta profesi lebih ditentukan oleh kepentingan uang dan pertimbangan ekonomis, sementara aspek etika-moral cenderung dikesampingkan.

“Biaya kesehatan, misalnya, makin mahal dan tinggi, di sini para dokter dan dunia kedokteran dituntut memiliki pertimbangan etis agar kedokteran dan obat-obatan tidak merugikan umat manusia yang membutuhkannya, namun harus mementingkan kemaslahatan umum dan beradab. Demikian juga bisnis dan politik, tanpa landasan etis, hanya menjadikan jutaan orang sebagai obyek sasaran untuk meraih keuntungan pribadi dan golongan, mengabaikan maslahat umum dan itu jelas tidak beradab,” kata Ramadan.

Tariq Ramadan berbicara bahwa korupsi, ketidakadilan, dan otoriterisme di Dunia Islam, untuk sebagian besar, menjadi pemicu ledakan perubahan, seperti yang terjadi dalam revolusi demokrasi “Arab Spring” tahun-tahun terakhir ini.

Tidak berarti korupsi dan ketidakadilan lantas sudah menjadi masa lalu, karena kini kawasan Timur Tengah yang dilanda *Arab Spring*, dan juga belahan Muslim yang lain, meski mereka memasuki era demokrasi dan kebebasan, belumlah lepas dari problem korupsi akut.

Bahkan di Timur Tengah pasca *Arab Spring*, korupsi dikhawatirkan tetap marak karena institusi-institusi negara dan politik masih “in the making”, sementara kontrol demokratis dan *checks and balances* belum berjalan baik, dan pula *good governance* (tata kelola penadbiran yang baik) masih barang langka di Dunia Islam, terutama Timur Tengah, Asia Selatan, dan Indonesia.

Dalam kaitan korupsi dan ketidakadilan, Tariq Ramadan menekankan: *Pertama*, pentingnya umat Islam terlibat dalam memperjuangkan hak-hak sosial-ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Mereka perlu juga dilibatkan dalam sistem di sekolah umum, dengan menjadi guru, siswa maupun orang tua. *Kedua*, bahwa umat Islam perlu terlibat dalam berbagai kegiatan pembelaan hak-hak sipil. *Ketiga*, mereka juga perlu tahu mengenai hak-hak setiap warga negara, serta mempelajari sisi hukum dan keadilan. Ini bukan hanya untuk individu seorang Muslim, tetapi ini merupakan tuntutan untuk menjadi pembela umat yang lainnya ketika terkena masalah serupa. Seharusnya, umat Muslim perlu memperjuangkan mengenai hak-hak mereka, hak orang lain, dan hak orang miskin yang umumnya terpinggirkan.

B. AGAMA DAN MASALAH KORUPSI: SEBUAH CATATAN DARI JAKARTA

Salah satu masalah sosial paling gawat di negeri ini adalah korupsi. Dari era Orde Baru sampai Reformasi dewasa ini, korupsi terus menggila dan untuk sebagian, akibat lemahnya akhlak dan integritas para pejabat, politisi, dan pebisnis yang seringkali mudah tergelincir ke dalam jerat korupsi. Akibatnya, di Indonesia, ummat Islam sebagai mayoritas rakyat, masihlah menderita dan marginal akibat korupsi yang mera-

jalela, feodalisme kekuasaan, dan struktur ekonomi-politik yang timpang. Harus kita akui, di era Reformasi ini, korupsi sudah mengancam keselamatan bangsa dan negara sehingga banyak teriakan agar segera diambil tindakan tegas dan keras terhadap para koruptor.

Dalam kaitan ini, berbagai literatur menggarisbawahi bahwa Islam tidak saja mengharamkan korupsi, tetapi juga memberikan solusi untuk melakukan tindakan preventif pencegahan supaya tidak terjadinya korupsi. Menurut seorang peneliti, dalam konteks Indonesia perlu kiranya menelusuri dan menerapkan tawaran Islam dalam memberantas korupsi yang sudah menggurita dalam segala bidang, ada enam langkah yang dapat dilakukan yaitu ²:

Pertama, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR Imam Ahmad). Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya.

Kedua, penghitungan kekayaan. Menurut kesaksian anaknya, yakni Abdullah bin Umar, Khalifah Umar pernah mengkalkulasi harta kepala daerah Sa’ad bin Abi Waqash. Putranya

² Watna Marpaung, “Memberantas Korupsi Menurut Perspektif Islam”, esai, *istanailmu.com*, diakses pukul 13.00, pada 8 Oktober 2012.

ini juga tidak luput kena gebrakan bapaknya. Ketika Umar melihat seekor unta gemuk milik anaknya di pasar, beliau menyitanya. Hal ini dilakukan Umar karena unta anaknya itu gemuk digembalakan bersama-sama unta-unta milik Baitul Mal di padang gembalaan terbaik. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, dia itu berkilah "Aku tidak bekerja padamu". Jawab Khalifah, "Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis!" Bahkan, Umar pun tidak menyepelekan penggelapan meski sekedar pelana unta. Apa yang dilakukan Umar merupakan contoh baik bagaimana harta para pejabat dihitung, apalagi mereka yang disinyalir terlibat korupsi.³

Syeikh Taqiyuddin dalam bukunya *Ahkamul Bayyinat* menegaskan bahwa pembuktian itu bisa berupa pengakuan dari si pelaku, sumpah, kesaksian, dan dokumentasi tertulis. Kaitannya dengan dokumentasi tertulis ini Allah Swt. menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Hendaklah penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya..." (QS al-Baqarah: 282). Bila dicermati, penulisan dokumen ini sebenarnya merupakan bukti tentang siapa yang berhak dan apa yang terjadi. Oleh karena kata "maka tuliskanlah (*faktubuh*)" dalam ayat tersebut umum, maka mencakup semua muamalah dan semua

dokumen termasuk perjanjian, kata-belece, keputusan pemerintah yang dibuatnya, dan lain-lain.

Ketiga, keteladanan pemimpin. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal Negara. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini. Penyidikan dan penyelidikan tindak korupsi pun tidak sulit dilakukan. Tapi bagaimana bila justru korupsi dilakukan oleh para pemimpin? Semua upaya apa pun menjadi tidak ada artinya sama sekali.⁴

Keempat, hukuman yang berat. Pada umumnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah). Artinya, dengan hukuman setimpal atas koruptor, diharapkan orang akan berpikir sekian kali untuk melakukan kejahatan itu.

Kelima, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu sulit berjalan dengan baik bila gaji tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarga.

Keenam, kontrol dan pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan

³ Watna Marpaung, "Memberantas Korupsi Menurut Perspektif Islam", *ibid.*

⁴ Watna Marpaung, "Memberantas Korupsi Menurut Perspektif Islam", *ibid.*

menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental *instan* akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Adapun masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”.⁵

Ajaran Islam itu relevan dengan situasi masyarakat kita sekarang. Apalagi, hampir pasti bahwa korupsi sekarang banyak terjadi karena keserakahan (*by greed*), bukan lagi disebabkan keterpaksaan karena impitan ekonomi (*by need*).

Dalam Islam, ada hadis Nabi Muhammad Rasulullah yang intinya mengajarkan bahwa hancurnya bangsa-bangsa sebelum kita disebabkan, “karena ada orang kuat secara politik dan ekonomi melanggar hukum namun tidak diapa-apakan. Sedangkan kalau ada orang lemah melanggar hukum, langsung dijatuhi hukuman.”

Itu adalah ketidakadilan. Kaum Muslim sering merujuk Ali ibn Abi Thalib yang dikutip oleh filosof politik Islam, Ibn Taymiah, yang memberi elaborasi hadis tersebut dengan mengatakan, “Akan jaya dan abadi suatu negara yang diperintah dengan adil meskipun negara itu bukan negara kaum muslimin, dan akan hancurlah suatu negara yang diperintah dengan tidak adil (zalim), meskipun negara itu

⁵ Watna Marpaung, “Memberantas Korupsi Menurut Perspektif Islam”, *ibid*.

adalah negara orang-orang Islam.”⁶

Akibat maraknya korupsi di Indonesia dewasa ini, rekomendasi Munas dan Konbes Alim Ulama NU awal Oktober 2014 di Cirebon menegaskan bahwa “koruptor perlu dijatuhi hukuman mati.” Sikap PBNU ini sangatlah revelan dan masuk akal mengingat korupsi — meminjam frase Bung Hatta— sudah membudaya di Indonesia.⁷

Di sini PBNU memiliki alasan rasional sebab korupsi sudah menjadi ancaman bagi kelangsungan bangsa dan negara kita. Dalam hal ini, demikian Mahfud MD, bukan hanya apa yang secara eksplisit tertuang di dalam Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yaitu “bahaya” dan “kegentingan”; melainkan ada yang lebih ganas dari itu yaitu korupsi sistemik. Kalau korupsi sistemik dan ketidakadilan terus merajalela, rakyat cenderung apatis terhadap negara. Bahkan rakyat bisa berubah menjadi lawan bagi penguasa negara.

Korupsi makin berurat-akar pada era Orde Baru seiring dengan laju pembangunanisme (*developmentalism*) waktu itu. Di masa Orde Baru, kebijakan politik dan ekonomi lebih memihak pada segelintir konglomerat yang memonopoli sumber-sumber ekonomi dari hulu hingga hilir. Kapitalisme *ersatz* merajalela, korupsi, kronisme, dan kolusi membaluti istana. Kondisi umat Islam dimarjinalkan, Islam politik mengalami fragmentasi, deformasi dan periferalisasi. Di tengah ketimpangan

⁶ Mahfud MD, *Korupsi Mengancam Keutuhan Negara* (Risalah: Jakarta), Mahkamah Konstitusi, 2012.

⁷ Korupsi politikus Zulkarnaen Djabar (ZD) atas proyek pengadaan Al-Qur’an, misalnya, amat merusak kredibilitas parpol karena efek berantainya yang kuat. Parpol seperti Golkar, PDIP, dan Demokrat selalu dalam sorotan publik akibat korupsi politik yang akut.

ekonomi semacam inilah aspirasi Islam muncul ke permukaan.⁸

Golongan menengah Muslim mendesak aspirasi serta kepentingan mereka untuk mampu bersaing dalam posisi yang timpang secara struktural dibandingkan kelompok penguasa dan minoritas lingkaran istana Soeharto yang sudah relatif mapan. Untuk sebagian besar, capaian ummat Islam itu masih sangat tipis kalau tak bisa dikatakan gagal.⁹

Namun, dalam era Reformasi pasca Orde Baru di era transisi yang sulit ini, sekarang para ulama dan santri menginginkan keadilan dalam artian tidak ada lagi penindasan pada orang-orang Islam baik dalam perekonomian, politik maupun kebudayaan.

Para ulama juga menginginkan ajaran Islam tidak dirusak oleh kalangan manapun dan atas nama apapun. Dan hal ini bukanlah satu hal yang sulit untuk dipahami. Sebab, setiap bangsa dimanapun tentu ingin diperlakukan secara adil. Tidak ada satu bangsa pun yang akan ikhlas dibodohi. Dan sungguh rasional apabila setiap bangsa di manapun di dunia ini ingin tumbuh dengan peradabannya sendiri, terutama kehidupan sosial yang bebas dari korupsi dan ketidakadilan.

Untuk menyelamatkan Indonesia dari korupsi yang menggila, peranan agama menjadi sangat penting dan mendesak di tengah gawatnya kemis-

kinan dan korupsi serta demokrasi kriminal di Indonesia. Kekuatan moral dan agama harus mampu menghentikan segala kejahatan korupsi dan pelanggaran HAM di Indonesia agar integrasi nasional terjaga dan rakyat punya harapan akan masa depan mereka.¹⁰

Hampir pasti bahwa kita semua merindukan organisasi-organisasi agama kembali memainkan peranan seperti saat perjuangan kemerdekaan: menyatukan Indonesia yang saat ini mulai retak, mengembalikan kekuatan idealism, dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah menguatnya demokrasi kriminal di Indonesia saat ini.

Karena itu, para tokoh agama dan masyarakat harus berani menyatakan kebenaran melawan ketidakadilan, korupsi, dan pelanggaran HAM berat. Hanya dengan cara itulah, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang pantang menyerah, bermartabat, mam-

⁸ Tentang Indonesia era Soeharto dan reformasi awal, lihat Donald K Emmerson, Editor, *Indonesia beyond Suharto: Polity, Economy, Society, Transition*, NY/London: ME Sharpe, 1999, hal. xxviii, 395. Tentang kapitalisme *ersatz* Orde Baru, lihat Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, terj. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1990).

⁹ Tentang aspirasi Islam di Indonesia, lihat Don Bosco Carvallo, *Aspirasi Ummat Islam Indonesia*, terjemahan (Leppenas: Jakarta), 1983.

¹⁰ Pandangan ini disampaikan oleh para tokoh masyarakat dan agama serta intelektual antara lain Rizal Ramli, Buya Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, sesepuh NU Solahudin Wahid, Ketua PGI Pendeta Andreas Yewangu, Ketua KWI Mgr M Situmorang, Sekjen TII Teten Masduki, Romo Benny Susetyo, advokat Todung Mulya Lubis, Ketua Institut Ecosoc Sri Palupi, Bondan Gunawan, Prof. JE Sehetapi, Moeslim Abdurrahman. Juga hadir, Ray Rangkuti, Ton Abdillah Has, Stefanus Gusma, Herdi Sahrasad, Yeni Rosa Damayanti, Djohan Efendi, Trisno Sutanto, Adhie Massardi, Abdulrachim dalam dialog yang dipandu pakar komunikasi UI, Effendi Gazali, tokoh-tokoh tersebut memaparkan sejumlah persoalan bangsa yang menggelayuti Indonesia di bawah pemerintahan SBY. Bertemakan "*Negara, Korupsi dan Agama*", para tokoh tersebut membahas dari mulai soal kemiskinan, angka pengangguran, pelanggaran HAM, maraknya korupsi, hingga kasus-kasus terkini seperti Century, Krakatau Steel, dan korupsi politik di Gedung Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI), Jakarta, Rabu (8/12/2010). Selanjutnya, simak, www.rimanews.com, diakses Minggu 10/10/12 pukul.13.00.

pu mengubah potensi dan kreatifitas negatif menjadi kekuatan positif untuk kesejahteraan rakyat dan kejayaan Indonesia.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, peranan agama-agama di Indonesia sudah terbukti sangat besar dalam mempersatukan rakyat Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan, dan memberi makna kepada Republik yang baru merdeka. Perjuangan 10 November 1945 di Surabaya, yang berhasil mengusir pemenang Perang Dunia II Sekutu dari bumi Pertiwi, tidak lepas dari peranan organisasi agama yang nasionalis dan militan.

Dewasa ini, bangsa dan negara Indonesia dicengkram oleh kekuatan pragmatisme, kekuatan oligarki, dan superioritas uang dalam setiap aspek kehidupan kenegaraan. Berbagai kasus korupsi, mega-skandal, kejahatan kerah putih, dan pelanggaran HAM berat merupakan akibat dari dominasi pragmatisme dan kekuatan uang dalam kehidupan bernegara. Pisau hukum sangat tajam terhadap rakyat biasa, tetapi sangat tumpul dan penuh rekayasa terhadap kelompok elit yang berkuasa. Cengkeraman tersebut akan menjerumuskan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang selalu kalah, mudah menyerah, dan gampang dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan luar, sehingga rakyat akan terus menderita dan Indonesia akan sulit bangkit untuk menjadi negara yang adil, besar, dan sejahtera.

Republik Indonesia terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dengan agama dan suku yang berbeda. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan, untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selama

ini, potensi dan kreatifitas bangsa Indonesia yang besar, masih banyak tertumpu pada hal-hal yang negatif. Sudah tiba saatnya, potensi dan kreatifitas yang besar itu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang positif. Alangkah indahnya jika perubahan perilaku dan tujuan untuk berbangsa itu dapat terjadi.

C. KASUS KPK, DUKUNGAN ULAMA, DAN MASYARAKAT MADANI

Dewasa ini, ada kesadaran baru di kalangan ulama dan santri bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini harus dilakukan dengan cara luar biasa dan dengan strategi yang menyeluruh dan jitu. Selama penegak hukum di luar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum sejalan, maka kekuatan rakyat (kaum santri dan masyarakat madani) menjadi pilar utama dalam pemberantasan korupsi yang sudah merajalela di semua sendi kehidupan penyelenggaraan negara ini.¹¹

Sudah umum diketahui bahwa praktik korupsi sudah memprihatinkan, lebih parah lagi sikap permisif masyarakat yang menganggap seolah-olah kejahatan korupsi itu biasa saja. Padahal, praktik korupsi sangat berbahaya dan menyengsarakan masyarakat.

Di tengah tekanan atas upaya lembaga lain melakukan kriminalisasi terhadap penyidik KPK, KPK berharap

¹¹ Lihat, "Korupsi Sengsarakan Rakyat", harian *Kompas* Jateng, Minggu (7/10/12). Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu (6/10/12), pada pertemuan dengan ulama dan tokoh masyarakat di Kantor Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah di Semarang. Hadir dalam pertemuan itu mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi, Ketua PWNU Jateng KH Moh Adnan, Ketua DPW Muhammadiyah Jateng KH Mustman Thalib, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, para ketua PCNU se-Jateng, para tokoh penggiat antikorupsi serta tokoh lintas agama di Jateng.

dukungan rakyat mampu membangkitkan semangat juang bagi KPK memerangi korupsi.

Dukungan rakyat itu, penting pada saat bangsa ini kehilangan pemimpin yang bisa menjadi teladan dalam upaya pemberantasan korupsi. Di negara lain, bahkan presiden yang menjadi teladan hidup sederhana untuk memelopori pemberantasan korupsi.

Menurut mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi, upaya kriminalisasi KPK merupakan bukti nyata bahwa penyelenggara negara belum satu suara dalam pemberantasan korupsi. Pelaku penekanan terhadap penyidik KPK yakni Novel Baswedan punya atasan. Atasan Kepala Polri itu adalah Presiden, maka mestinya Presiden yang menegur dan mengusut tindakan kriminalisasi KPK oleh Polri itu.

Sebab, di negara mana pun pemberantasan korupsi berhasil apabila lembaga penegak hukum dan komponen seluruh bangsa ini bersatu memeranginya. Ketika pemimpin lemah, DPR yang mestinya melindungi rakyat dan membela KPK terbukti malah juga menggembosinya. Karena itu, upaya membawa pimpinan KPK kepada warga nahdliyin juga kalangan NU dan Muhammadiyah di Jateng merupakan bagian menyambungkan KPK dengan rakyat. Biarlah rakyat memahami kondisinya sehingga rakyat tergerak menjadi pembela KPK.

Sudah berulang kali upaya pemberantasan korupsi dijegal elite kuasa sendiri. KPK kembali mengalami kriminalisasi di tengah upaya mengungkap kasus korupsi pengadaan simulator berkendaraan di Korps Lalu Lintas (Korlantas) yang melibatkan sejumlah petinggi Polri. Kepala Satuan Tugas Penyidikan KPK untuk kasus simulator, Komisaris Novel Baswedan, ditetapkan

menjadi tersangka kasus penganiayaan yang terjadi delapan tahun lalu saat masih bertugas di Polres Bengkulu.

Tak ayal penetapan Novel sebagai tersangka itu membuat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Sabtu dini hari (6/10/12) menyebutnya sebagai kriminalisasi terhadap anggota KPK. Jumat sekitar pukul 19.30, tak lama setelah KPK selesai memeriksa tersangka kasus pengadaan simulator, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, sejumlah perwira dari Polda Bengkulu, dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Dedy Irianto, bersama perwira Polda Metro Jaya mendatangi KPK. Dedy membawa surat perintah penangkapan terhadap Novel.

Namun, penangkapan terhadap Novel tak berhasil. Rombongan perwira polisi itu hanya berada di lobi Gedung KPK. Pihak KPK meminta mereka menunggu karena pimpinan KPK saat itu tak berada di tempat. Ketua KPK Abraham Samad sedang dalam perjalanan dari Makassar dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tengah dalam perjalanan dari Samarinda. Tiga wakil ketua KPK lainnya tak berada di kantor.

Kabar penangkapan Novel itu cepat merebak di berbagai jaringan media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Sejumlah elemen masyarakat sipil, tokoh-tokoh publik, anggota DPR, dan pemerintah langsung berdatangan ke KPK. Tak hanya Novel, kabar yang berkembang sebelumnya ada lima penyidik KPK yang akan dijemput paksa karena belum lapor ke Mabes Polri setelah masa tugasnya habis.¹²

¹² Namun, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, upaya penangkapan Novel bukan tindakan kriminalisasi. "Yang dilakukan penyidik Polda Bengkulu dan dibantu penyidik Polda

Kian larut massa yang datang ke KPK semakin banyak. Beberapa kelompok mahasiswa dan masyarakat yang ingin mengetahui kondisi sebenarnya di KPK saat itu berdatangan. Mereka semua memberi dukungan kepada KPK dan menolak upaya kriminalisasi terhadap siapa pun di KPK.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, yang ikut berbaur di KPK, mengaku kecewa karena pejabat pemerintah tak juga bersikap ketika KPK berada dalam bahaya. Padahal, KPK adalah pilar pemberantasan korupsi di negeri ini.

D. DI BALIK HASRAT DPR MEREVISI UU KPK

Dalam sebuah percik pemikirannya, Soedjatmoko (mantan Rektor Universitas PBB) pernah mengingatkan bahwa hari depan kita ditentukan oleh keputusan moral kita hari-hari ini.

Kalau DPR hari-hari ini begitu berhasrat untuk melakukan revisi UU KPK (Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi), maka yang terbersit adalah gairah dewan yang sudah kurang terhormat itu, untuk melumpuhkan lembaga antikorupsi tersebut. Untuk sebagian, hasrat DPR itu merefleksikan krisis moral dan integritas dari para politisi kita di parlemen. Mengapa?

Maraknya korupsi politik sudah sangat memprihatinkan dan sudah pada tahap gawat darurat yang ditandai

Metro Jaya adalah murni tindakan penegakan hukum terhadap kasus dugaan tindak pidana yang terjadi pada Februari 2004. Masalah seperti ini jangan dibawa ke masalah seolah-olah terjadi suatu benturan kepentingan Polri dan KPK," kata Sutarman dalam jumpa pers yang didampingi Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Suhardi Alius dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu Kombes Dedy Irianto.

dengan krisis akhlak dan krisis kepemimpinan karena kebanyakan elite dan penguasa yang ada sekarang adalah "ruling class" yang bermental korup, bukan pemimpin yang berakhlak dan mau melayani, mengayomi, dan memberdayakan rakyat.

Dalam kaitan krisis moral (akhlak) dan integritas ini, secara sederhana penulis mencatat, ada beberapa hal krusial yang harus digarisbawahi:

Pertama, sejak awal rekrutmen, partai politik kita yang menghasilkan para anggota DPR, terkesan kuat sudah tidak bersih dan tidak tulus ikhlas untuk melayani rakyat, sebab motivasi mereka masuk ke parlemen adalah memburu uang dan kekuasaan. Seakan perburuan ini, meminjam frase Clifford Geertz, adalah untuk meraih *power above power*, meskipun sejatinya hanya untuk meraih "kenikmatan belaka" sebagai "kelas elite" sehingga mereka tetap menjadi *the ruling elite* yang berkuasa dengan aneka *privilege* dan keuntungannya, meminjam perspektif Gaetano Mosca.

Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur, bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Namun, bukan rahasia lagi bahwa penggunaan dana-dana itu tidaklah produktif dan tidak pula mampu mendorong para kader dan politisi bersikap kreatif. Pula pemakaian dana-dana tersebut sangat tidak efektif dalam upaya membangun demokrasi yang berkualitas.

Bahkan, dalam prakteknya, kekuatan modal dan ambisi kelompok/golo-

ngan, sudah membajak dan menyelenggarakan partai politik dari visi-misi reformasi, dan akibatnya, masyarakat disodori teater politik yang kotor, bukan pendidikan politik yang mencerahkan. Dan kini, salah satu "hasrat kotor" itu adalah menghapuskan komitmen anti-korupsi melalui pelumpuhan dan pemandulan KPK dengan cara melakukan revisi atas UU KPK itu sendiri.

Jika semua ini terus dibiarkan, bakal gagal pulalah upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel yang semestinya berawal dari pengelolaan dari partai politik yang bersih, transparan, dan akuntabel, termasuk pengelolaan keuangan partai.

Mengingat para politisi parpol banyak yang terlibat korupsi, sangat sulit kita berharap pemerintahan yang ada, sekarang dan mendatang, bisa bersih dan kredibel. Korupsi politik sejak awal sudah dimulai dari para politisi itu sendiri. Banyaknya politisi yang terlibat korupsi adalah fakta yang kasat mata.

Dalam konteks DPR yang berhasrat merevisi UU KPK itu, patologi "korupsi" merupakan realitas hitam yang nyaris tiap hari terbaca publik di media massa dan media sosial. Begitu tampak jelas bahwa jalan pintas yang ditempuh partai politik dalam menjaring kader (termasuk kader medioker), menjadi salah satu penyebab maraknya dugaan korupsi yang dilakukan kalangan anggota DPR (dan eksekutif).

Sudah bukan rahasia lagi bahwa desakan untuk mengembalikan modal kampanye, membuat kader parpol di DPR melakukan tindak korupsi, sementara fungsi legislasi merosot tajam, dan merupakan kenyataan yang kelam.

Lemahnya kinerja untuk legislasi dapat dilihat dari banyaknya UU yang digugat ke MK (Mahkamah Konstitusi).

Yang juga harus disimak bahwa dewasa ini begitu banyak anggota DPR yang juga pengusaha. Sehingga, tidak dapat dipungkiri, paradigma untuk 'balik modal' (*return of investment*) kuat tertanam di jiwa dan sanubari mereka. Motif pengusaha masuk ke politik rata-rata nyaris sama, yakni mencari laba ekonomi-politik dengan segala cara dalam upaya "balik modal" tadi.

Praktis, imbas dari kaderisasi buruk, kinerja jelek, dan jeratan korupsi itu, menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, yang kian menguat.

Pertanyaannya: Sampai kapan krisis akhlak dan krisis integritas ini dan sampai kapan negara dan masyarakat (*civil society*) membiarkan semua ini terjadi ?

Lihatlah, tingkat kepercayaan terhadap DPR, dari data terakhir yang kita terima, hanya 20%. Ini merupakan tingkat kepercayaan terhadap DPR terendah di seluruh dunia. Semua itu toh tidak pernah jadi "cambuk" yang efektif agar DPR kita bekerja lebih baik dan merasa malu untuk korupsi.

Karena DPR tak punya malu pada korupsi, maka sejatinya mereka hanyalah politisi yang mencabuli dirinya sendiri.

Sungguh, adanya hasrat DPR untuk melakukan revisi UU KPK justru membuat DPR malah terancam tidak akan lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia, dan hal ini menyusul adanya upaya melemahkan kewenangan KPK ketika memberikan "tanda bintang" pada rencana pembangunan gedung baru.

DPR harusnya menyadari bahwa selama ini KPK disokong oleh rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi. Sehingga, langkah DPR untuk melakukan revisi KPK, akan merusak keper-

cayaan rakyat pada lembaga legislatif ini, dan otomatis pula, partai politik akan mengalami nasib serupa.

Kepercayaan rakyat pada mereka akan berkurang drastis sebagai akibat dari upaya melemahkan KPK tersebut. Tapi apakah suara moral ini didengar DPR kita? Kita merasa skeptis.

Kita meyakini, tatkala kepercayaan rakyat atas DPR semakin tergerus, baik parpol maupun legislator bakal terancam mengalami krisis legitimasi. Tentunya rakyat yang merasa terus dibohongi dan ditipu-muslihat oleh mereka pasti tidak akan tinggal diam dan hampir pasti menghukum mereka pada pemilu legislatif 2014. Rakyat sendiri memiliki peran besar dalam pemilu parpol dan legislatif 2014. Tanda dari hukuman rakyat yang ditimpakan ke sejumlah parpol, misalnya, sudah terlihat jelas pada kemenangan Jokowi dan Ahok dalam pemilukada DKI Jakarta.

Tapi, apakah parpol dan DPR kita mau mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini? Sekali lagi, kita masih skeptis.

Pasalnya, sudah terlalu sering elite politik kita hanya meyakini pandangan dan keyakinan dirinya sendiri sehingga acapkali terantuk batu yang sama. Tentu, tidak ada politisi yang mau jadi keledai, tapi kalau terlalu sering terantuk batu yang sama, apa kata publik tentang mereka? Nasib mereka bisa terjerembab di lubang yang pengap. Sungguh ironis bukan?

E. RESPON INTELEKTUAL ATAS PELEMAHAN KPK

Yang harus digarisbawahi oleh elite penguasa adalah bahwa di kalangan kaum terpelajar, umum diketahui bahwa draf revisi Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberan-

tasian Korupsi (UU KPK) yang dirancang DPR dimaksudkan untuk melemahkan KPK, dengan pengurangan sejumlah kewenangannya. Proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya dihentikan karena dikhawatirkan bakal memereteli kewenangan komisi itu. Revisi UU KPK sejauh ini cenderung melemahkan komisi itu. Draf revisi tersebut berisi usulan untuk menghilangkan kewenangan penuntutan, membatasi kewenangan penyadapan, dan membentuk Dewan Pengawas untuk membatasi gerak komisi itu. Semua usulan tersebut tidak disertai argumentasi kuat, apalagi naskah akademik hasil kajian atau penelitian serius.¹³

Proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya dihentikan karena dikhawatirkan bakal memereteli kewenangan komisi itu. KPK merupakan produk reformasi dan masih sangat dibutuhkan di tengah maraknya praktik korupsi di Tanah Air.

Dalam merespon isu pelemahan KPK ini, sangat disayangkan bahwa Presiden SBY terlalu hati-hati dalam bersikap. Padahal KPK tengah dilemahkan secara sistematis seperti yang dikeluarkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Sungguh sayang bahwa Presiden sebagai atasan langsung Kepala Polri tidak langsung memerintahkan agar penyidikan kasus korupsi simulator diserahkan sepenuhnya ke KPK.

Maka, wajar jika semua pertanyaan bermuara pada Presiden Yudhoyono:

¹³Uraian ini selanjutnya, baca *kompas.com* dan *Jakartapost.com* edisi 1-12 Oktober 2012. Lihat juga, harian *the Jakarta Post* dan *Kompas* edisi cetak 1.12 Oktober 2012.

Seberapa serius SBY memimpin pemberantasan korupsi di negeri ini? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri kemudian memerintahkan Menkopolkam Djoko Suyanto untuk menghubungi pimpinan KPK dan meminta Kapolri mengendalikan jajarannya agar tak mengepung dan melemahkan KPK. Tidak hanya itu, istana juga mendapat masukan untuk mengatasi konflik antara KPK versus Polri.¹⁴

Memang, spekulasi kemudian bermunculan menyusul sikap KPK menghadapi Polri dalam kasus korupsi simulator SIM. Persoalan tambah

runyam dengan disangkut-pautkannya spekulasi publik bahwa Presiden SBY terlalu hati-hati menangani persoalan dua institusi hukum tersebut.

Spekulasi merebak bahwa ada upaya membenturkan KPK dengan Presiden SBY. "Tidak benar Ketua KPK pernah menyatakan melalui Twitter dan menyebut nama Presiden," kata Juru bicara KPK, Johan Budi seraya menjelaskan, Ketua KPK Abharam Samad tidak punya akun Twitter sehingga tidak mungkin menggunakannya untuk berkomunikasi dengan publik.

Seperti diketahui, sejak KPK digeruduk sejumlah polisi pada Jumat malam pekan lalu, gerakan 'menyelamatkan' komisi antirasuah ini semakin gencar dilakukan, tak terkecuali di dunia maya.

Melalui akun Twitter, para pendukung KPK mengumpulkan kekuatannya melalui #saveKPK. Situs Hashtracking.com mencatat pembicaraan di hastag itu sudah diikuti oleh 1.462.116 orang dalam tempo 24 jam.

Dalam carut marut KPK vs Polri itu, adakah solusinya yang arif dan bijak? Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengajukan lima solusi kepada publik dan pemerintah, yang bisa diambil guna mengatasi polemik dua lembaga penegak hukum ini.

Pertama, Presiden meminta kepada Kapolri menyerahkan kasus SIM Simulator ke KPK. Perdebatan yang ber-sumber pada peraturan perundang-undangan dan MoU harus dihentikan. "Dalam kasus SIM simulator yang menjadi pihak yang disangka adalah anggota Polri sehingga untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) harus dilakukan oleh KPK," kata Juwana. Di kemudian hari bila personel KPK atau Kejaksaan yang terlibat, maka

¹⁴ Yang aneh dan ganjil bahwa jajak pendapat yang dilakukan lembaga riset Ipsos baru-baru ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling bahagia di muka bumi. Dari survei itu diketahui bahwa 51 persen orang Indonesia mengaku sangat bahagia. Dalam indeks kebahagiaan versi Ipsos itu Indonesia mengungguli sejumlah negara lain, seperti India, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, Saudi Arabia, Prancis, Italia, Rusia, China, dan juga Korea Selatan. Indeks Ipsos ini memang menimbulkan kontroversi. *Pertama*, polling itu hanya melibatkan 19.000 orang dewasa dari 24 negara. *Kedua*, tidak begitu jelas definisi kebahagiaan yang dimaksud dalam polling itu. *Ketiga*, kepada para responden, Ipsos yang dipimpin Didier Truchot mengajukan pertanyaan apakah responden sangat bahagia (*very happy*), agak bahagia (*rather happy*), tidak begitu bahagia (*not very happy*) dan tidak bahagia sama sekali (*not happy at all*). *Keempat*, dalam polling itu juga tidak terlihat kaitan antara kemampuan atau daya beli per kapita terhadap kebahagiaan. Sesuatu yang sulit untuk dibayangkan di saat uang menjadi salah satu "keyakinan utama" masyarakat modern. Untuk kasus Indonesia, bukankah semua, atau hampir semua hal, diukur dengan uang? Dengan *purchasing power parity* atau kemampuan daya beli per kapita pada 2011 sebesar 4.700 dolar AS, Indonesia berada di urutan pertama. Mengalahkan Meksiko yang berada di urutan ketiga dengan 42 persen orang bahagia dan daya beli per kapita sebesar 15.000 dolar AS. Australia yang memiliki daya beli per kapita sebesar 40.000 dolar AS atau Amerika Serikat yang memiliki daya beli per kapita sebesar 48.000 dolar AS juga berada di bawah Indonesia. Masing-masing dengan 28 persen dan 27 persen orang yang berbahagia. Atau Korea Selatan yang memiliki daya beli per kapita sebesar 31.800 dolar AS disebutkan hanya memiliki kurang dari 10 persen orang yang bahagia.

tidak boleh institusi tersebut yang melakukan proses hukum.

Kedua, Polri tidak melakukan penarikan penyidik yang bertugas di KPK, termasuk yang sudah melapor ke kepolisian dan telah diberi tugas baru. Mereka harus dikembalikan ke KPK untuk melanjutkan tugas yang belum selesai. Penarikan akan dilakukan setelah ada koordinasi dengan KPK bahwa tugas mereka telah selesai.

Ketiga, penyidik Polri yang hendak berkarir di KPK harus memenuhi prosedur yang berlaku di Polri. KPK harus menghormati etika yang berlaku antar-instansi. Untuk menjamin agar tidak ada gangguan dalam proses pindah instansi ini maka Kompolnas akan melakukan supervisi.

Keempat, jajaran Polri harus menghentikan akrobat hukum yang penuh dengan kejanggalan yang bisa dipersepsikan oleh publik sebagai pelemahan terhadap KPK dan menghentikan proses hukum terhadap personil Kepolisian. Teladan Kapolri Sutanto harus diikuti, di mana sejumlah perwira tinggi tidak dihalangi ketika harus menghadapi tuduhan tindak pidana korupsi.

Kelima, Kapolri diminta untuk melakukan investigasi atas inisiatif Polda Bengkulu yang hendak melakukan penangkapan atas Kompol Novel Baswedan. Investigasi ini harus mengikutsertakan anggota Kompolnas. Inti dari investigasi adalah apakah tindakan hukum tersebut memang benar-benar ada atau sekedar dirancang atau direkayasa?

Bila benar dan memiliki dasar yang kuat, proses hukum tetap dilakukan namun setelah Kompol Novel menjalankan tugas penting di KPK. Namun, bila inisiatif Polda Bengkulu itu tidak benar, maka harus dilakukan proses

sanksi internal terhadap anggota-anggota Polda Bengkulu yang terlibat.

F. PENUTUP

Upaya apapun sudah selayaknya ditempuh untuk mengakhiri pertikaian antara KPK dan Polisi. Tentunya dengan penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Mengingat dua lembaga ini sangat dibutuhkan perannya dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sehingga carut-marut KPK versus Polri bisa diakhiri oleh istana, tanpa harus menyeret Presiden/istana lebih jauh ke dalam pusaran konflik yang ruwet dan merugikan negara itu

Perlu diketahui, dalam pemilihan presiden di tahun itu SBY mendapatkan dukungan sebesar 61 persen, membuatnya dengan mudah menaklukkan Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla. Namun akhir tahun lalu, dukungan publik kepada SBY, menurut salah satu polling, hanya sebesar 42 persen. Bahkan, dalam polling yang digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS) belum lama ini disebutkan bila tidak ada pembatasan periode pemerintahan, hanya 17,3 persen responden yang memilih SBY.¹⁵

Menurut *The Economist* ada dua hal utama yang membuat baik SBY maupun Partai Demokrat tergelincir. *Pertama*, adalah persoalan korupsi yang melilit sejumlah petinggi partai itu sehingga membuat partai itu mendulang *public humiliation*. *Kedua*, persepsi publik yang cenderung menganggap SBY mengalami penggerusan otoritas akibat koalisi parpol yang sering mengalami konflik kepentingan.

¹⁵ Baca *The Economist*, laporan mengenai Indonesia era SBY, Februari 2012.

Yang menyedihkan kita, upaya pelemahan KPK oleh institusi lain sering berulang. Para intelektual kita mencatat upaya melemahkan institusi pemberantasan korupsi bukan hal baru. Di sini, lembaga negara yang bertugas melawan korupsi patah tumbuh hilang berganti. Tahun 1957 ada Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang bertugas mendata kekayaan pejabat saat itu. Paran kalah terhadap pembangkangan. Bahkan, orang-orang seperti AH Nasution, M Yamin, dan Roeslan Abdulgani pun tidak cukup kuat menghadapi resistensi para pejabat yang enggan melaporkan kekayaannya. Padahal, kewajaran kepemilikan kekayaan dibandingkan dengan penghasilan yang sah adalah salah satu alat mengukur korup atau tidaknya seorang pejabat negara.¹⁶

Kemudian, masih ada lagi Operasi Budhi tahun 1963, dipimpin AH Nasution. Dalam perjalanannya, fitnah terhadap personel lembaga ini berkembang hingga akhirnya dibentuk Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi). Meski Presiden Soekarno menjadi ketua dibantu Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani, upaya ini akhirnya stagnan juga.¹⁷

Pada era Orde Baru pun, sejumlah lembaga antikorupsi berdiri. Ada Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Jaksa Agung, Komisi Empat, dan Operasi Tertib.¹⁸

Pada era Orde Baru semua upaya membasmi korupsi gagal total karena Rezim Soeharto sendiri sangat korup, otoriter, dan membiarkan korupsi me-

ngorupsi negeri ini. Kejatuhan Orde Baru ditandai dengan beban utang luar negeri Rp1300 trilyun dan beban BLBI Rp 650 trilyun, suatu angka terbesar dalam sejarah krisis ekonomi Dunia. Ketika, suatu malapetaka yang paling tragis di Asia Tenggara.

Pada era Reformasi, kita masih ingat nasib Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang bubar ketika sedang mengusut dugaan suap sejumlah hakim agung. Sebuah putusan *judicial review* di Mahkamah Agung mematikan lembaga ini. Kabarannya pidato Gus Dur di depan DPR dulu, terkait rencana penerbitan Perppu Pembuktian Terbalik, tidak disambut baik. Ada juga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang kemudian dibubarkan dan dibentuklah KPK berdasarkan UU No 30/2002¹⁹.

Bahkan kalau kita periksa, sesungguhnya langkah dan upaya pengkhianatan terhadap harapan rakyat melalui pelemahan KPK antara lain dilakukan lewat belasan kali uji materi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi, tetapi selalu gagal. Mereka tidak menyerah, upaya lebih canggih dilakukan melalui usulan revisi terhadap UU No 30/2002 tentang KPK. Isu pokoknya agar KPK tidak menjadi lembaga super. Karena itu, UU perlu diubah dengan membatasi kewenangan penyadapan, penghapusan penuntutan, dan hak tidak menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pembentukan Dewan Pengawas KPK, serta kasus korupsi di bawah Rp 5 miliar tak lagi ditangani KPK. Akal-akalan ini

¹⁶ Febri Diansyah, "Membunuh KPK", *Kompas*, Rabu, 3 Oktober 2012.

¹⁷ Febri Diansyah, "Membunuh KPK", *ibid.*

¹⁸ Febri Diansyah, "Membunuh KPK", *ibid.*

¹⁹ Febri Diansyah, "Membunuh KPK", *Kompas*, Rabu, 3 Oktober 2012.

mendapat perlawanan gigih dari masyarakat.²⁰

Ikhtiar mutakhir yang dianggap merongrong KPK adalah kasus dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM), khususnya dalam memeriksa tersangka Irjen Djoko Susilo. Polisi berkukuh, kasus ini menjadi ranah kepolisian. Institusi ini merasa lebih dahulu melakukan pemeriksaan. Sementara itu, KPK, sesuai dengan UU No 30/2012, dengan tegas menyatakan kasus ini sudah terlebih dahulu mereka sidik. Sudah seharusnya menjadi kewenangan KPK.²¹

Belum habis upaya DPR melemahkan KPK, mendadak polisi pada Jumat malam (5/10/12) malah mengepung KPK dalam apa yang disebut Bambang Widjojanto sebagai kriminalisasi polisi terhadap KPK.

Maka, benar apa yang dikatakan oleh Mochtar Pabottingi bahwa apa yang kita sebut krisis multidimensi sebetulnya bersimpul satu, yaitu tiadanya *Rechtsstaat*. Kata *recht* di sini menghimpun semua kebajikan atau moralitas publik: benar, adil, beradab, patut, sah, dan berharkat.²²

Dalam kaitan ini, Mochtar Pabottingi bertanya: Ke manakah ditaruh butir ketiga misi Polri untuk “menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju pada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan”?

Di sini, Pabottingi melihat perilaku kalangan DPR dan saudara-saudara kita di kepolisian tak ubahnya dengan pe-

patah: “Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan!”

Sependapat dengan Pabottingi, kita pun sungguh merasa terwakili oleh suara KH. Said Aqil Siroj, pemimpin Nahdatul Ulama, yang telah memberikan peringatan kepada instansi perpajakan “soal ancaman umat tak bayar pajak” serta mencanangkan imbauan “hukuman mati” bagi para koruptor kakap di Tanah Air.

Sekali lagi, dukungan umat Islam kepada KPK mutlak dibutuhkan. Di sini integritas, kompetensi, keberanian, dan keterpaduan jajaran pimpinan KPK, harus selalu diteguhkan dan dilaksanakan. Bahwa KPK dibentuk untuk mengakhiri praktik diktum impunitas pada Orde Reformasi. Para pemimpinnya sedang berjuang keras untuk menegakkan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) pada titik sentral.

Hadi Soesastro, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ketika masih hidup pernah mengatakan, kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi globalisasi tidak didasarkan pada pertimbangan ideologis, tapi pragmatis. Akibatnya, Indonesia tergilas arus globalisasi, hanya menjadi tukang jahit dan buruh. Sedang penguasa Indonesia, lebih suka menjadi pemburu rente atau komisi. Sumberdaya Alam Nusantara yang kaya raya, dipasrahkan pada asing.

Dalam kaitan ini, pers nasional telah membeberkan, pada sektor pertambangan, penguasaan asing mencapai 75%. Pada industri minyak, 75% pengelolaannya adalah modal asing, melibatkan 16 perusahaan asing sebagai operator. Pada industri batu bara, ada perusahaan pengelola yang sahamnya antara 55% dan 100%. Pada sektor

²⁰ J Kristiadi, “Perilaku Politik ‘Rai Gedheg’”, *Kompas*, 2 Oktober 2012.

²¹ J Kristiadi, “Perilaku Politik ‘Rai Gedheg’”, *ibid.*

²² Mochtar Pabottingi, “Negara Tanpa Recht”, *Kompas*, 4 Oktober 2012.

perbankan, konsentrasi kepemilikan asing juga makin meningkat, dari 47,02% pada 2008 menjadi 50,06% pada 2010.

Di sektor jasa telekomunikasi, penguasaan asing juga besar. Yang "terendah" adalah pada Smart Fren Telecom yakni 23,9%, kemudian Telkomsel 35%, Hutchinson 60 %, Indosat 70,14%, XL Axiata 80 %, dan Natrindo 95 %. Pada sektor agroindustri terdapat beberapa perusahaan yang menguasai produk yang familiar bagi konsumen nasional.

Sampai sekarang, setidaknya berlaku 118 undang-undang yang tak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Bahkan, 76 dari UU itu langsung diintervensi oleh asing. Pasca reformasi, berdasarkan hasil laporan BIN, 76 UU kita dikonsepsi oleh konsultan asing. Ke-76 legislasi usulan pemerintah yang akhirnya diundangkan itu misalnya UU Migas, Kelistrikan, Perbankan dan Keuangan, Pertanian, Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air, UU Pendidikan Nasional, UU BUMN, serta UU Pemilu.

Mantan Presiden BJ Habibie, dalam pidatonya pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni di Gedung MPR, menyatakan, pengalihan kekayaan alam Indonesia ke pihak asing di era globalisasi ini merupakan bentuk kolonialisme VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) gaya baru.

Hasilnya, "Indonesia kini dikuasai oleh asing, kekuasaan ekonomi apalagi. Saham-saham penting milik negara dan sumber daya alam sudah lebih dari setengah telah beralih kepemilikan oleh korporasi asing dan kekuatan ekonomi Indonesia saat ini tak lebih dari 2 hingga 8 persen saja.

Itu pun banyak yang dicaploki koruptor lokal. Menurut Indonesia

Corruption Watch (ICW), birokrasi kementerian memang salah satu "trio macan" korupsi dan yang menjadi sumber pokok korupsi politik ada pada politikus, pengusaha, dan birokrat. Mereka menjadi trio macan korupsi.

Akibatnya, rezim korup sampai era SBY-Boediono dikhawatirkan para akademisi, sudah tidak lagi punya "alasan moral dan legitimasi" untuk mempertahankan NKRI apalagi Pemilu legislatif, dan pilpres 2009 diwarnai kecurangan, juga tidak tuntasnya skandal Century, mafia pajak, pembusukan KPK dan merajalelanya kolusi-korupsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta dunia usaha.²³

Pemerintahan SBY dan masyarakat menyadari bahwa korupsi merupakan penyakit bangsa yang sulit dibasmi. Bahkan, Indonesia menurut laporan Transparansi Internasional, termasuk negara paling korup di Asia. Dan dari 186 negara yang diteliti, hanya enam negara yang indeks persepsi korupsi (IPK) di atas 9,0 dan 49 negara di atas 5,0. Artinya, 80 persen masyarakat dunia hidup di bawah pemerintahan yang korup. Dengan indeks 3,0, Indonesia berada di peringkat 100 di bawah Qatar (7,2), Uni Emirat Arab (6,8), Brunei (5,2), Bahrain (5,1), Kuwait (4,6), Arab Saudi (4,4), Malaysia (4,3), Turki (4,2), Tunisia (3,8), dan Maroko (3,4). Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, korupsi harus diperangi oleh negara dan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia.

²³ Demikian ditulis www.rimanews.com, dalam situsnya Jum'at(2/11/12). Amien Rais dalam bukunya yang berjudul "Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!", menyebut keputusan politik dan undang-undang selama ini lebih menguntungkan kepentingan luar dan merugikan kepentingan bangsa sendiri.

Selama lima tahun terakhir, IPK Indonesia mengalami peningkatan dari 2,3 (2007), 2,6 (2008), 2,8 (2009), 2,8 (2010) dan 3,0 (2011). Itu menunjukkan ada kemajuan dan harapan dalam pembeantasan korupsi. Namun, korupsi masih menjadi masalah yang serius dan sulit dibasmi. Bahkan, intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi korupsi semakin meningkat.

Dalam kaitan ini, selama KPK terus terancam kriminalisasi, maka mudah dibaca bahwa segenap institusi negara dan masyarakat belumlah bersungguh-

benar dalam membasmi korupsi, malah terkesan langkah pembasmian korupsi itu boleh jadi hanya basa-basi politik.

Akankah kelak KPK, (bersama kepolisian dan kejaksaan) berhasil membersihkan korupsi di Indonesia di masa depan? Jawaban untuk itu, tentu untuk sebagian besar ditentukan oleh respon, komitmen, dan dukungan ummat Islam dan *civil society* terhadap kiprah dan gerak maju KPK, dan pemerintah dalam membasmi korupsi di Tanah Air kita.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Don Bosco Carvallo, 1983. *Aspirasi Ummat Islam Indonesia*, terjemahan. Jakarta: Leppenas
- Donnald K Emmerson, Editor, 1999. *Indonesia beyond Suharto: Polity, Economy, Society, Transition*, NY/ London: ME Sharpe.
- Mahfud MD, 2012. *Korupsi Mengancam Keutuhan Negara*. Jakarta: Risalah. Mahkamah Konstitusi.
- Tariq Ramadan, 2012. *Islam and the Arab Awakening*, Oxford University Press.
- Tariq Ramadan, 2008. *Radical reform: Islamic Ethics and Liberation*, Oxford University Press.
- Watna Marpaung, 2012. "Memberantas Korupsi Menurut Perspektif Islam", esai, *istanailmu.com*, diakses pukul 13.00, pada 8 Oktober 2012.
- Yoshihara Kunio, 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, terj. Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES.
- INTERNET
- kompas.com* dan *Jakartapost.com* edisi 1-12 Oktober 2012 .
- the Jakarta Post* dan *Kompas* edisi cetak 1.12 Oktober 2012.
- The Economist*, laporan mengenai Indonesia era SBY, Februari 2012.
- Febri Diansyah, "Membunuh KPK" , *Kompas*, Rabu, 3 Oktober 2012.
- J Kristiadi, "Perilaku Politik 'Rai Gedheg'", *Kompas*, 2 Oktober 2012.
- Mochtar Pabottingi, "Negara Tanpa Recht", *Kompas*, 4 Oktober 2012.



INDEKS PENULIS

A

Akmal Salim Ruhana

"Terorisme [sama dengan] Jihad?"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 149

Ali Usman

Kolumnis pendidikan, peneliti Lembaga Analisis Sosial dan Penguatan Masyarakat (LANSKAP) Yogyakarta

"Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 65

Arief Subhan

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 81

H

Herdi Sahrasad

Dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina

"Agama dan Masalah Korupsi: Sebuah Catatan"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 1

I

Iyoh Mastiyah

Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

"Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 19

N

Nurudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI

"Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 31

S

Sudirman Tebba

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 113

Suprpto

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

“Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang)”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 127

Syahrul Kirom

Dosen STAI Khozinatul Ulum Blora, Jawa Tengah, Alumnus Program Master Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta. Alamat Rumah: Jl. Pabrik Migas No. 12 Kampung Baru Cepu Blora Jawa Tengah.

“Pancasila Dalam Bingkai Kerukunan Beragama”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 45

Syaripulloh

Pengajar FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

“Penanggulangan Kemiskinan”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 95

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

Buku (monograf)

Kuntowijoyo.1998. *Paradigma Islam, Intre-pretasi untuk Aksi*. Mizan: Ban-dung.

Artikel (Jurnal)

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star Trex: The Next Generation. *Studies in Popular Culture* 13(2): 53:65.

Situs web

Lynch, Tim. 1996. Review of DS 9 trials and tribble-ations. Psi-Phi: Bradley's Science Fiction Club. [Http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html](http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html) (accessed October 8, 1997).

7. Transliterasi berpedoman pada pedoman transliterasi Library of Congress,
8. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
9. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
10. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Dr. H. Susari, M.A. (Redaktur Eksekutif)

HP: 0821 141 70501

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

soesary@yahoo.com